

## BURSA &amp; FINANSIAL

## UU P2SK Dinilai Bakal Mereformasi Industri Keuangan Indonesia

## NERACA

Jakarta – Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana menilai Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan mereformasi sektor keuangan Indonesia.

"Undang-undang ini merupakan omnibus law pada sektor keuangan dan menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan tentunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi sektor keuangan Indonesia," kata Heru, seperti dikutip kemarin.

Heru menuturkan momentum reformasi sektor keuangan Indonesia melalui undang-undang tersebut menjadi upaya untuk memperkuat ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan tersebut meliputi antara lain pemulihan pascapandemi, dinamika perekonomian global yang terus berkembang, pesatnya inovasi teknologi sektor keuangan yang memaksa perubahan model bisnis layanan jasa keuangan, serta indeks literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. "Semua ini tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih serius dari pelaku usaha dari kita semua untuk bisa keluar dari berbagai tantangan tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, UU P2SK mengatur lima ruang lingkup, yakni penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap mempertahankan independensi, dan penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.

Ruang lingkup berikutnya adalah mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, perlindungan konsumen, serta penguatan literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Mochemad Imron mengatakan salah satu poin utama yang menjadi sentral dari UU P2SK adalah penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/BPRS Syariah (BPRS).

Penguatan tersebut dilakukan dari sisi permodalan, branding, dan digitalisasi, termasuk adanya kerja sama dengan lembaga penunjang untuk penguatan efisiensi dan daya saing BPR/BPRS.

"Sekarang dengan penamaannya bank perekonomian rakyat, BPR/BPRS ke depan akan menjadi lebih luas bukan hanya memberikan pembiayaan atau kredit saja tapi juga ada hal-hal lain yang bisa dilakukan termasuk dalam lalu lintas pembayaran, bisa melakukan transfer, kemudian penukaran valuta asing," ujarnya.

UU P2SK meningkatkan efisiensi dan daya saing BPR/BPRS dengan cara digitalisasi, melakukan penyertaan modal di lembaga penunjang dan bekerja sama dengan lembaga keuangan lain. Selain perluasan jangkauan bisnis BPR/BPRS, UU P2SK juga mendorong penguatan permodalan BPR/BPRS. Menurut Imron, salah satu permasalahan BPR/BPRS adalah permodalan. Oleh karenanya dalam UU P2SK, BPR dapat melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum di bursa efek. **●bari**

## Bank Mega Bukukan Laba Rp4,05 Triliun

## NERACA

Jakarta - PT Bank Mega Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp4,05 triliun pada 2022 atau naik 1,11 persen dibanding tahun lalu (year-on-year/yo) yang sebesar Rp4,01 triliun di tengah kondisi perekonomian yang cukup menantang sepanjang tahun lalu. Perolehan laba bersih Bank Mega dikonstruksikan melalui kenaikan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NI) sebesar 21,24 persen (yo) menjadi Rp5,87 triliun dari sebelumnya sebesar Rp4,84 triliun.

"Dengan perolehan ini, laba bersih Bank Mega menjadi yang ketujuh terbesar di antara perbankan Indonesia," kata Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thyab dalam acara Public Expose Bank Mega di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Ia melanjutkan, total aset Bank Mega pada tahun lalu pun naik menjadi Rp141,75 triliun atau tumbuh sebesar 6,68 persen (yo) dari Rp132,88 triliun. Dalam penyaluran kredit, Bank Mega mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,84 persen (yo) menjadi sebesar Rp70,29 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60,68 triliun.

Di sisi penghimpunan dana, pada akhir 2022 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mega tumbuh sebesar 4,09 persen (yo) menjadi Rp102,95 triliun, dari posisi yang sama periode sebelumnya sebesar Rp98,91 triliun.

Kostaman mengungkapkan beberapa rasio perbankan Bank Mega pun membaik, seperti tingkat pengembalian aset (Return on Assets/ROA) yang tercatat sebesar 4 persen, tingkat pengembalian ekuitas (Return on Equity/ROE) sebesar 23,15 persen, dan rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sebesar 68,04 persen.

Kemudian, rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) bruto sebesar 1,23 persen, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 25,41 persen, margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) sebesar 5,42 persen, serta rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 56,76 persen. **●bari**




**PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI ANDALAN**

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI ANDALAN yang telah diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" tertanggal 30 November 2022 dan tambahan informasi atas rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI ANDALAN yang telah diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" tanggal 12 Januari 2023, kami, PT Mandiri Manajemen Investasi, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI ANDALAN, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI ANDALAN, sebagaimana termaktub dalam akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI ANDALAN No. 43 tanggal 23 Februari 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI ANDALAN serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 27 Februari 2023

**Manajer Investasi,  
PT Mandiri Manajemen Investasi**  
Menara Mandiri II, lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telepon : (021) 526 3505  
Faksimili : (021) 526 3506

**Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**



**RUPS LB KB BUKOPIN SYARIAH** : Kiri ke Kanan : Direktur Bisnis PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) Agus Suhendro, Komisaris Utama Independen KBBS Mustafa Abubakar, Direktur Utama Bank KB Bukopin Syariah Koko Tjatur Rachmadi dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko KBBS Adil Sya Putra berfoto bersama usai RUPS LB di Jakarta, Jumat (24/2/2023). Dalam RUPS LB tersebut diputuskan Koko Tjatur Rachmadi menjadi Direktur Utama KBBS menggantikan posisi sebelumnya Indra Falatehan. Aksi korporasi Perubahan Pengurus dalam struktur organisasi ini merupakan upaya yang ditempuh KBBS untuk menjaga kepercayaan nasabah.

## Lebih Baik Belanja atau Menabung?

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta masyarakat Indonesia untuk belanja. Pasalnya dana masyarakat yang dalam bentuk tabungan masih cukup tinggi sehingga apabila dana tersebut dimanfaatkan maka akan menggerakkan roda perekonomian. Akan tetapi disisi lain, terdapat dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang tersimpan di perbankan juga cukup tinggi.

## ■ NERACA

Terlepas dari pentingnya menyimpan dana di tabungan ataupun membelanjakannya, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrin menilai kegiatan belanja dan menabung adalah dua hal yang baik untuk negara. Dzulfian mengatakan, dengan berbelanja seseorang telah memberikan pendapatan bagi orang lain. Namun, kata "belanja" sering dikonstruksikan sebagai konsumtif yang negatif.

"Tanpa belanja maka tidak akan ada transaksi, ekonomi mandek. Tanpa belanja, tidak ada pembeli, pen-

jual/produsen pun akhirnya menjadi lesu, ujung-ujungnya bisa gulung tikar," ujar Dzulfian, seperti dikutip Antara, kemarin.

Lebih lanjut, kesadaran menabung baik untuk individu dan perekonomian secara keseluruhan. Bagi orang pribadi, tabungan akan menjadi buffer atau cadangan ketika terjadi sesuatu yang tak terduga, seperti musibah, sakit, bencana dan pengeluaran lainnya. "Bagi ekonomi, tabungan tinggi merupakan sumber pendapatan yang murah. Akhirnya suku bunga bisa kita tekan, kredit menjadi lebih murah, investasi naik, perekonomian bisa melesat karena tambahan 'darah'

dari dana tabungan ini," kata Dzulfian.

Namun demikian, Dzulfian menekankan bahwa belanja yang tidak boleh dilakukan adalah yang bersifat berlebihan atau di luar kemampuan seseorang tanpa perencanaan yang matang. Belanja yang dipaksakan ini dapat berujung pada musibah terilit utang dan mendadak bangkrut. Menurut dia, masyarakat perlu diajarkan meleak kelola keuangan agar tepat guna dalam mengalokasikan setiap peser uang.

Lebih lanjut, Dzulfian mengatakan pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan guna meningkatkan daya belanja masyarakat.

"Tanpa itu masyarakat akan naik turun belanjanya karena adanya ketidakpastian harga dan ketersediaan barang, apalagi ini sudah mau Ramadhan, barang-barang biasanya pada melonjak, ini mesti diantisipasi," kata Dzulfian.

Di 2022, Jokowi mengatakan konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93 per-

sen. Oleh karena itu, dia berharap pada 2024 nanti angka konsumsi masyarakat bisa berada di angka 5,4 persen. Selain itu, pada 2022 belanja masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan atau ada dalam tabungan di bank mencapai Rp690 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat mengerem untuk berbelanja.

Sementara itu, dikutip laman CNBC Indonesia, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. Andy Asmoro menilai ada empat fakta yang menjadi pemicu masyarakat menahan belanja. Pertama, ada kekhawatiran akan kondisi perekonomian ke depan yang menurun terutama berlaku pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan pengusaha. "Akhirnya mereka saving untuk digunakan di rainy day," kata Andy.

Kedua, dari catatan Andy, ada kenaikan biaya-biaya yang menekan real income mereka. Kondisi ini membuat konsumen melakukan efisiensi dengan belanja seperlunya atau mengurangi wisata dulu, menurut Andy. **●bari**

## Tangani 8 KSP Bermasalah, Kemenkop Bentuk Tim Khusus

## NERACA

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM membentuk tim khusus (timsus) untuk melanjutkan kerja satuan tugas (satgas), yang telah berakhir masa tugasnya dalam menangani kasus delapan koperasi bermasalah.

"Dengan telah berakhirnya masa tugas satgas penanganan koperasi bermasalah, maka perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap koperasi bermasalah," kata Deputy Bidang Perkerjasama Kemenkop UKM Ahmad Zabadi di Jakarta, Sabtu (25/2).

Kedelapan koperasi bermasalah tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pratico Inti Utama, KSP Pratico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda. Kemenkop UKM,

kata Zabadi, telah memberikan empat tugas kepada timsus tersebut.

Pertama, melakukan pendampingan rapat anggota tahunan (RAT) terhadap delapan koperasi bermasalah.

Tugas kedua, melakukan pemantauan harian terhadap delapan koperasi bermasalah terkait dengan pembayaran skema per-damaian PKPU yang telah dihomologasi oleh pengadilan.

Lebih lanjut, tugas ketiga adalah melakukan mediasi terkait dengan penanganan delapan koperasi bermasalah.

Keempat, melakukan koordinasi dengan pengurus dan pengawas delapan koperasi bermasalah dan terakhir bertugas melaporkan pendampingan dan pemantauan kepada Deputi Bidang Perkerjasama Kemenkop UKM.

Pada Januari 2022, Kemenkop UKM telah membentuk satgas untuk me-

nanagi delapan koperasi bermasalah untuk menjawab keluhan masyarakat atas koperasi bermasalah.

Hal tersebut sejalan dengan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat, termasuk anggota koperasi bermasalah.

Anggota satgas berasal dari lintas kementerian/-lembaga (K/L) maupun dari aparat penegak hukum hingga masyarakat.

Pembentukan satgas juga dilakukan untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis dan dapat memastikan putusan PKPU dijalankan secara benar.

Rata-rata pelaksanaan putusan PKPU tersebut dilakukan antara 2021 sampai

2026. Waktu putusan dinilai cukup panjang dan masih ada koperasi bermasalah yang belum memenuhi harapan anggota koperasi. Secara umum, satgas memiliki cakupan tugas melakukan inventarisasi dan penilaian aset oleh appraisal independen (tanah, bangunan, dan lainnya seperti piutang), melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah termasuk aspek hukum, mengecek lokasi, dan pemeriksaan koperasi bermasalah. Kemudian, menyusun rekomendasi penanganan koperasi bermasalah, melakukan pengawasan pembayaran, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. **●bari**

## PERBANKAN

## Bank Muamalat Catat Nilai Transaksi Kartu Debit Tumbuh Dua Digit

## NERACA

Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan volume dan nilai transaksi kartu debit Shar-E sebesar dua digit selama tahun 2022. Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Muamalat Hery Syafril mengatakan, jumlah kartu debit Bank Muamalat yang beredar saat ini sekitar 600 ribu kartu.

Adapun total volume transaksi kartu debit Bank Muamalat per 31 Desember 2022 mencapai lebih dari 1 juta transaksi atau tumbuh sebesar 29% secara tahunan (year-on-year/yo). "Volume tersebut menghasilkan nilai transaksi lebih dari Rp500 miliar atau tumbuh 23 persen yo," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Jumat (24/2).

Sementara itu, lanjut dia, transaksi tertinggi terjadi pada Desember 2022 dengan nilai transaksi sekitar Rp60 miliar dan volume transaksi sebanyak lebih dari 100 ribu transaksi. Hery menjelaskan, peningkatan transaksi sepanjang 2022 didorong oleh sejumlah faktor. Di antaranya peningkatan fitur pada kartu debit yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara online melalui jaringan VISA.

Kartu debit Bank Muamalat selain dapat digunakan untuk transaksi secara offline melalui EDC merchant maupun online (e-commerce dan online shop) serta tarik tunai di seluruh jaringan VISA di dalam maupun luar negeri.

Hery juga merinci secara umum langkah melakukan pembayaran menggunakan fitur debit online. Pertama pilih metode pembayaran (kartu debit). Kedua, masukkan data kartu debit yang tertera pada bagian depan kartu. **●bari**

## Dunia Usaha Sambut Baik Bunga Nol Persen

## NERACA

Jakarta – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyambut baik usulan Menteri BUMN soal program bunga kredit nol persen bagi usaha mikro kecil.

Menurut Sarman, program bunga nol persen merupakan terobosan yang ditunggu pelaku usaha mikro kecil yang selama ini kesulitan mengajukan pinjaman ke bank salah satunya karena terkendala syarat administrasi seperti dokumen perusahaan, laporan rugi laba, hingga proposal peruntukan pinjaman dan jaminan.

"Dengan adanya program ini menjadi angin segar dan menjadi pertanda jutaan usaha mikro kecil akan pulih dan bangkit menggerakkan ekonomi akar rumput untuk percepatan pemulihan dan penguatan ekonomi nasional," katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sarman mengatakan saat ini adalah momentum yang tepat untuk memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menjadi salah satu penopang dan kekuatan perekonomian nasional di tengah ancaman krisis ekonomi global. Terlebih, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 62,55 persen dan menyumbang serapan tenaga kerja hingga 97,22 persen.

Sayangnya, meski kontribusi UMKM tinggi, akses pembiayaan untuk segmen tersebut sampai saat ini baru mencapai 21 persen. Maka, tak heran jika banyak pelaku UMKM meminjam tambahan modal kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

"Harapan kita nanti pada pelaksanaannya agar penyaluran kredit bunga nol persen ini tepat sasaran dan tepat guna. Data penerima kredit nol persen ini harus transparan dan terbuka dengan usaha yang jelas," katanya.

Sarman menilai peran Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi dan UKM di daerah serta asosiasi usaha mikro kecil sangat diharapkan untuk memberikan data yang valid agar penerima program ini benar-benar pelaku usaha mikro yang memang sangat membutuhkan modal kerja.

"Jika UMKM kita tumbuh dan cepat bangkit tentu kita harapkan secara perlahan akan naik kelas dan mampu menyediakan lapangan kerja baru bagi anak-anak bangsa sehingga akan memberikan kontribusi menurunkan angka pengangguran," kata Sarman. **●bari**




**PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PNM ETF CORE LQ45 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) ("PNM ETF CORE LQ45")**

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi PNM ETF CORE LQ45 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi PNM ETF CORE LQ45.

Berikutan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian ("Bank Kustodian") telah sepakat untuk melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PNM ETF CORE LQ45 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "PNM ETF CORE LQ45") sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran PNM ETF CORE LQ45 tertanggal 23 Februari 2023.
- PNM ETF CORE LQ45 akan dibubarkan karena sebagian Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan penjualan kembali atas Unit Penyertaan PNM ETF CORE LQ45 yang dimilikinya sebagaimana termaktub dalam Asset & Liability Report tertanggal 8 Februari 2023 yang mengakibatkan total Nilai Aktiva Bersih PNM ETF CORE LQ45 di bawah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk melakukan pembubaran PNM ETF CORE LQ45 tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu kewajiban memubarkan Reksa Dana dengan Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 160 (seratus enam puluh) Hari Bursa berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif") dan Pasal II angka 1 huruf c Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.04/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi Dalam Menengah Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK19/2021").
- Pada tanggal 27 Februari 2023, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran dan likuidasi PNM ETF CORE LQ45 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. S-057/PNM-M-Dir/INV/II/2023 dan pada tanggal yang sama Manajer Investasi telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM ETF CORE LQ45 tertanggal sejak tanggal yang sama dengan pengumuman ini.
- Pembubaran dan dimulainya likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran PNM ETF CORE LQ45 yang dibuat di hadapan Notaris. Pembayaran dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan akan dilakukan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih PNM ETF CORE LQ45 pada saat likuidasi selesai dilakukan, dimana Nilai Aktiva Bersih PNM ETF CORE LQ45 pada saat likuidasi selesai dilakukan tersebut dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih PNM ETF CORE LQ45 yang terakhir dihitung dan dipublikasikan pada tanggal 27 Februari 2023. Dana hasil likuidasi tersebut akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 27 Februari 2023

**PT PNM Investment Management**  
Manajer Investasi selaku Likuidator  
**PNM ETF CORE LQ45**  
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**PT Putra Mandiri Jember Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PEMBERITAHAUAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi PT Putra Mandiri Jember Tbk ("Perseroan") menyampaikan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 ("Rapat"). Rapat akan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan menggunakan fasilitas EAZY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), maka panggilan rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaftaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan (<https://www.ptpmj.com/id/>).

Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) POJK, pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara Rapat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penganggilan Rapat dan berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dan pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham Perseroan atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) POJK.

Jakarta, 27 Februari 2023  
PT Putra Mandiri Jember Tbk  
Direksi




**PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANDIRI PENDAPATAN TETAP OBLIGASI NEGARA**

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA MANDIRI PENDAPATAN TETAP OBLIGASI NEGARA yang telah diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" tertanggal 30 November 2022 dan tambahan informasi atas rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI NEGARA yang telah diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" tanggal 12 Januari 2023, kami, PT Mandiri Manajemen Investasi, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA MANDIRI PENDAPATAN TETAP OBLIGASI NEGARA, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA MANDIRI PENDAPATAN TETAP OBLIGASI NEGARA, sebagaimana termaktub dalam akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANDIRI PENDAPATAN TETAP OBLIGASI NEGARA No. 47 tanggal 24 Februari 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MANDIRI PENDAPATAN TETAP OBLIGASI NEGARA serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 27 Februari 2023

**Manajer Investasi,  
PT Mandiri Manajemen Investasi**  
Menara Mandiri II, lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telepon : (021) 526 3505  
Faksimili : (021) 526 3506

**Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**